

Agribisnis dan Ekonomi Pangan

Prof. Dr. E. Gumbira Sa'id, M.A., DEV.



PENDAHULUAN

Agribisnis merupakan rangkaian kegiatan budidaya di lini *on-farm* (di dalam lahan budidaya) dan peningkatan nilai tambah komoditas-komoditas *on-farm*, melalui proses pengolahan, pemasaran dan distribusinya (*off-farm*). Secara garis besar, agribisnis terdiri dari empat subsistem, yaitu (1) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi, (2) subsistem produksi primer atau usaha tani (*on-farm*), (3) subsistem pengolahan atau agroindustri, dan (4) subsistem pemasaran. Usaha agribisnis mampu menggerakkan perekonomian melalui mekanisme alokasi sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegunaan yang tidak terbatas. Untuk memahami cara kerja sistem perekonomian, terdapat beberapa faktor yang harus diidentifikasi, termasuk pula interaksi yang terjadi di antara masing-masing faktor tersebut.

Modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1 : Pengenalan Sistem Agribisnis Pangan.

Kegiatan Belajar 2 : Ekonomi Pangan.

Setelah mempelajari Modul 1 ini Anda diharapkan akan dapat:

1. menyebutkan definisi agribisnis;
2. menyebutkan subsistem dalam agribisnis pangan;
3. menyebutkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keterkaitan antarsubsistem dalam agribisnis pangan;
4. menyebutkan definisi ekonomi pangan dan menjelaskan kondisi pangan dan pertanian di Indonesia.

Kegiatan Belajar 1

Pengenalan Sistem Agribisnis Pangan

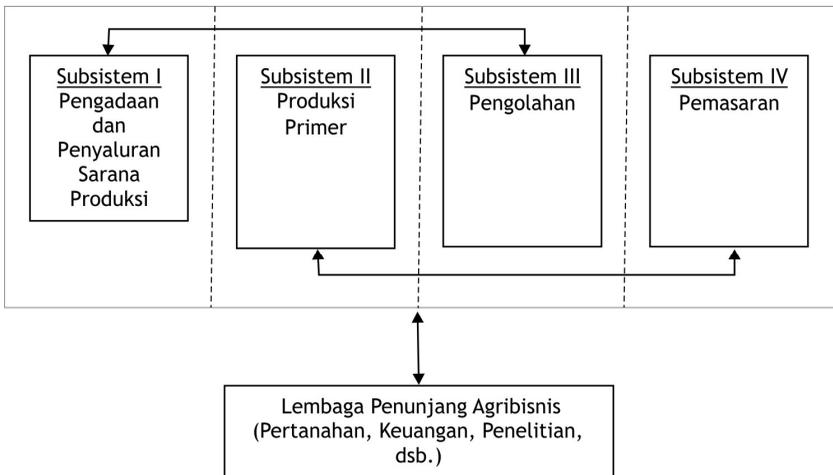
A. PENDAHULUAN

Agribisnis merupakan kegiatan yang tidak hanya terfokus pada proses budidaya di lini *on-farm* (di dalam lahan budidaya) saja, melainkan juga merupakan sistem yang mencakup proses peningkatan nilai tambah komoditas-komoditas *on-farm*, melalui proses pengolahan serta pemasaran dan distribusinya (*off-farm*). Banyak pakar yang telah mendefinisikan agribisnis dari berbagai sudut pandang. Davis dan Goldberg (1957) *di dalam* Harling (2003) mendefinisikan agribisnis sebagai sejumlah kegiatan yang dilibatkan dalam proses manufaktur dan distribusi input produksi, budidaya komoditas di lini *on-farm*, pengolahan produk-produk tersebut, proses pengemasan dan penyimpanan hingga proses pemasaran serta distribusi komoditas dan produk-produk yang dihasilkan dari proses pengolahan komoditas tersebut. Di lain pihak, Vogeler (1981) *di dalam* Samuel *et.al.* (1996) menyebutkan bahwa agribisnis adalah interelasi dan koordinasi sistem pangan dan serat yang didominasi oleh sejumlah input dan perusahaan-perusahaan pengolahnya. Dalam hal ini, agribisnis dinyatakan sebagai bisnis pangan dan serat, yang di dalamnya selain terjadi kegiatan produksi, proses pengolahan, distribusi, pasokan input dan pemasaran, juga berkaitan erat dengan pengaruh kebijakan pemerintah dan pihak institusi pendidikan.

B. SUBSISTEM AGRIBISNIS PANGAN

Deskripsi di atas menggambarkan agribisnis sebagai suatu sistem, yang dibangun oleh berbagai subsistem. Dengan demikian, agribisnis dapat dijalankan dengan baik apabila pengembangannya dapat dilakukan secara terpadu dan selaras dengan seluruh subsistem yang tersusun di dalamnya (Gumbira-Sa'id dan Intan, 2001) (Gambar I-1.1). Setiap subsistem di dalam sistem agribisnis memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan sehingga agribisnis akan dapat dijalankan dengan baik apabila mekanisme hubungan antar setiap subsistem agribisnis bekerja dengan baik pula. Secara garis besar Gumbira-Sa'id (2000) mengungkapkan bahwa subsistem yang tersusun di dalam agribisnis terdiri dari empat subsistem, yaitu subsistem pengadaan dan

penyaluran sarana dan prasarana produksi, subsistem produksi primer atau usaha tani (*on-farm*), subsistem pengolahan atau agroindustri dan subsistem pemasaran. Hubungan yang terjadi di antara masing-masing subsistem, misalnya dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara subsistem produksi primer dengan subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Kegiatan budidaya di lini *on-farm* dapat berjalan dengan baik, salah satunya jika ditunjang dengan pengadaan dan penyaluran sarana produksi yang memadai. Selanjutnya, proses budidaya atau produksi primer sangat berperan penting dalam menghasilkan komoditas-komoditas dengan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan subsistem pengolahan, baik dari segi standar mutu, kuantitas, maupun kontinuitas pasokan bahan baku produksi. Meskipun produk yang dihasilkan oleh subsistem pengolahan memiliki kualitas yang prima, tetapi mekanisme sistem agribisnis tidak akan berjalan sempurna apabila dalam penyampaian produk tersebut ke tangan konsumen tidak ditunjang dengan proses pemasaran, transportasi maupun pola distribusi yang sesuai (Gambar I-1.1). Dengan demikian, menjadi jelas bahwa setiap subsistem berperan penting satu sama lain untuk menciptakan sistem agribisnis yang efektif dan efisien.



Sumber: Gumbira-Sa'id dan Intan (2001).

Gambar 1.1.
Sistem Agribisnis dan Lembaga Penunjangnya

Erickson *et.al.* (2002) mengungkapkan bahwa agribisnis pangan memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari sistem-sistem agribisnis lainnya. Setidaknya terdapat delapan hal yang menjadi ciri utama keunikan agribisnis pangan, sebagai berikut.

1. Pangan sebagai Produk

Bahan pangan sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat karena fungsinya sebagai kebutuhan yang mendasar sehingga juga berdampak terhadap perkembangan perekonomian negara. Dengan pentingnya fungsi pangan tersebut, sistem pangan menjadi hal yang harus banyak diperhatikan sebagai komponen kritis dalam stabilisasi ketahanan nasional (ketahanan pangan).

2. Kondisi Produksi Pangan secara Biologis

Pangan dihasilkan dari tumbuhan dan hewan. Keduanya merupakan makhluk hidup yang secara alamiah biologis dipengaruhi oleh variasi perubahan cuaca dan hama penyakit yang sangat mempengaruhi tingkat kemampuan produksinya.

3. Produksi Bersifat Musiman

Kemampuan produksi pangan sangat dipengaruhi musim sehingga untuk beberapa jenis bahan pangan, ketersediaannya tidak dapat ditemui dalam jumlah yang besar dan merata sepanjang tahun.

4. Produksi Pangan Dipengaruhi oleh Ketidakpastian Kondisi Cuaca dan Iklim

Agribisnis pangan dipengaruhi oleh kondisi alam, terutama cuaca dan iklim. Musim kemarau, banjir, serangan hama dan penyakit merupakan ancaman bagi agribisnis pangan sehingga setiap pelaku yang terlibat di dalam agribisnis pangan harus memiliki kepedulian terhadap pengaruh cuaca dan iklim tersebut terhadap produksi pangan.

5. Tipe Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam agribisnis pangan memiliki tipe dan skala usaha yang bervariasi. Hal tersebut membentuk lingkungan bisnis tempat perusahaan-perusahaan agribisnis pangan beroperasi.

6. Kondisi Pasar yang Bervariasi

Beberapa jenis pasar memiliki karakteristik pembeli yang memiliki kekuatan yang sama dengan penjual terhadap perubahan harga di pasar. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu sangat memungkinkan salah satunya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan harga produk atau jasa.

7. Berhubungan Erat dengan Masyarakat Pedesaan

Banyak kegiatan agribisnis pangan dilakukan di pedesaan sehingga agribisnis pangan menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan.

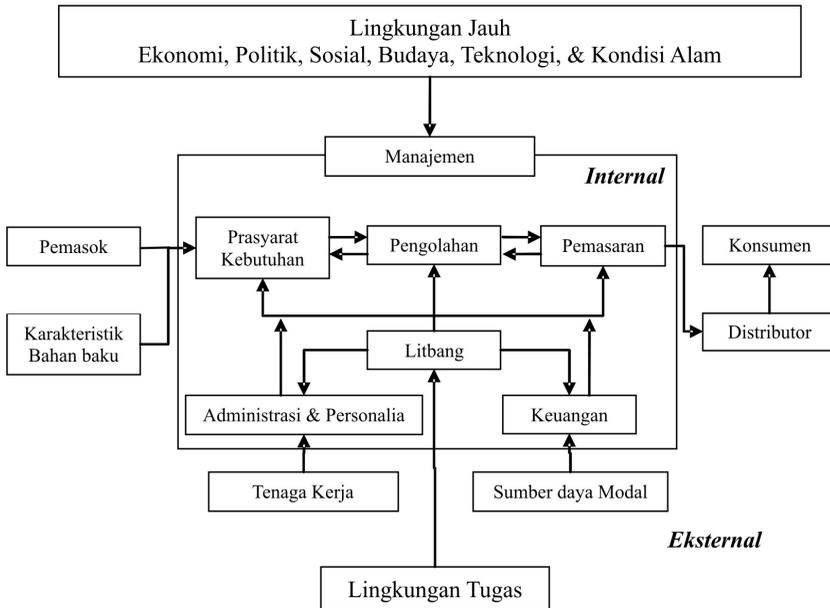
8. Keterlibatan Pemerintah sangat Berpengaruh terhadap Ketersediaan Pasokan Pangan

Pemerintah memiliki peranan mendasar dalam agribisnis pangan, mengingat beberapa kebijakan dan program kegiatan pemerintah mempengaruhi harga komoditas pangan dan pendapatan petani, perlindungan kesehatan konsumen, regulasi tarif dan kuota perdagangan.

C. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KETERKAITAN ANTAR SUBSISTEM AGRIBISNIS

Keterkaitan antara subsistem-subsistem agribisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal dalam sistem agribisnis biasanya merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan agribisnis atau agroindustri, terdiri dari aktivitas pengadaan input (benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, permodalan dan kredit, irigasi); proses pengolahan (peningkatan nilai tambah), baik yang terjadi di lini *on-farm* (sumber daya lahan, sumber daya manusia, teknologi dan manajemen) maupun *off-farm* (pengolahan hasil pertanian, kemitraan dan penyimpanan); proses pemasaran (harga dan mutu produk); serta distribusi. Selain itu, faktor-faktor penelitian dan pengembangan, administrasi dan personalia serta keuangan juga termasuk ke dalam faktor-faktor internal sistem agribisnis. Di lain pihak, yang merupakan faktor-faktor eksternal agribisnis adalah faktor karakteristik bahan baku, pemasok bahan baku, tenaga kerja, dana investasi, preferensi konsumen atau pasar, kondisi ekonomi-politik-sosial-budaya,

tingkat teknologi serta kondisi lingkungan (Gambar 1.2) (Gumbira-Sa'id dan Intan, 2001).



Sumber: Intan (1994) dalam Gumbira-Sa'id dan Intan (2001).

Gambar 1.2.
Kerangka Analisis Mikro Sistem Agribisnis

Sektor agribisnis Indonesia yang sesungguhnya mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi dan mendapatkan momentum pemberdayaan yang tinggi sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997, untuk hal-hal mendasar sangat tertinggal dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Thailand dan Malaysia. Ketertinggalan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari karakteristik perkembangannya maupun dari sumber daya pendukungnya.

Usaha tani yang merupakan subsistem dalam sistem agribisnis, terutama yang diusahakan oleh rakyat, sampai saat ini belum sepenuhnya berorientasi pada pasar walaupun telah mempertimbangkan berbagai aspek keuntungan, namun masih lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Luas lahan usaha rata-rata petani Indonesia hanya 0,5 ha. Dikaji dari tingkat pendidikannya, dari 60% angkatan tenaga kerja yang terserap di bidang pertanian, 15,2% tidak pernah sekolah, 27,9% tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 8,6% tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 4% tamat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan hanya 0,2% berpendidikan diploma dan Sarjana (Lingga, 1999). Kondisi di atas menyebabkan tingkat keterampilan teknis dan manajerial SDM agribisnis Indonesia juga relatif rendah sehingga pengelolaan usaha taninya juga kurang berorientasi pada bisnis dan pasar. Hal tersebut diperburuk oleh kurangnya akses terhadap informasi dan komunikasi yang menyebabkan sering kali produk agribisnis Indonesia ditolak di pasar global atau terjebak oleh kelebihan penawaran yang terjadi di pasar. Di lain pihak, penggunaan teknologi produksi masih terbatas sehingga produktivitas agribisnis atau agroindustri Indonesia tergolong rendah (Roekasah, 1997). Selanjutnya, berbagai kondisi dan permasalahan agribisnis Indonesia di antaranya dipaparkan di bawah ini (Gumbira-Sa'id, 2000).

1. Telah terjadi konversi lahan pertanian yang subur menjadi areal non pertanian dalam jumlah yang sangat besar. Tidak terkontrolnya konversi lahan pertanian yang subur terutama di Pulau Jawa, menjadi *real estate*, lapangan golf yang secara ekonomi tidak memberi nilai tambah dan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Konversi lahan pertanian yang subur tersebut diperkirakan telah mencapai satu juta hektar.
2. Terjadinya fragmentasi kepemilikan dan penguasaan lahan yang terus-menerus sehingga luas lahan yang dimiliki atau yang dikelola petani sangat sempit. Diperkirakan kepemilikan lahan rata-rata keluarga tani hanya sekitar 0,5 hektar sehingga tidak ekonomis dalam pengelolaannya.
3. Sistem distribusi input pertanian terutama untuk komoditas pangan dan hortikultura tidak berjalan secara efektif, seperti bibit, pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian yang diukur dari tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran dan tepat nilai atau harga sehingga menyulitkan bagi petani untuk mengintensifkan penggunaan input-input produktif sesuai dengan tata cara penerapan budidaya yang dianjurkan.
4. Pembinaan kelompok tani yang diharapkan mampu membantu petani dalam memperoleh informasi, input, dan membantu pemasaran produk, tidak berjalan secara efektif. Banyak kelompok tani yang terbentuk pada kenyataannya hanya papan nama saja, walaupun ada yang berhasil karena keuletan dan kesabaran para anggotanya. Hal ini juga terjadi karena lemahnya sistem pendampingan yang dilaksanakan.

5. Sistem penyaluran kredit pembiayaan pertanian juga tidak berjalan dengan efektif, yang juga diukur dari tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan besarnya biaya kredit sangat kecil sehingga pertumbuhan investasi di bidang agribisnis sangat lamban dan penyaluran modal kerja tidak mampu mendukung proses produksi yang berkelanjutan. Selain itu agribisnis selalu dianggap sebagai sektor ekonomi yang lambat menghasilkan uang, memiliki risiko finansial yang tinggi dan kurang bergengsi sehingga kurang diminati oleh kalangan investor termasuk sektor perbankan. Hal inilah yang memunculkan pola usaha “*profit sharing*” yang secara keamanan finansial masih sulit dilindungi aspek hukumnya.
6. Sistem penyuluhan dan komunikasi pertanian yang ada tidak berjalan secara efektif dalam memberikan bimbingan teknis kepada petani sehingga para petani tidak dapat secara konsisten menerapkan teknik budidaya yang baik dalam pengelolaan usaha taninya.
7. Koperasi, khususnya KUD, tidak berjalan secara efektif sebagai wahana pemberdayaan kekuatan ekonomi anggota sehingga banyak KUD yang dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah (*top down*), bukan untuk membantu pemberdayaan ekonomi anggota.
8. Sistem pengawasan pelaksanaan program pengembangan agribisnis juga tidak efektif sehingga sering kali timbul pelaporan fiktif atau pelaporan “asal bapak senang”, di mana informasi yang dikandungnya lebih sering menyesatkan. Hal ini terbukti sering kali sangat berbahaya, khususnya dalam pengadaan bahan pangan utama, seperti beras, gula, dan minyak makan.
9. Perencanaan pembangunan agribisnis nasional terpusat di Jakarta sehingga tidak mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan daerah yang spesifik atau berbeda satu sama lainnya. Di lain pihak, pemerintah tidak berhasil mendorong para pelaku agroindustri untuk memacu nilai tambah produknya di dalam negeri yang maksimal. Saat ini era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih baik dan tidak semakin mempersulit ekonomi nasional secara keseluruhan.
10. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang agribisnis dilakukan secara tidak terintegrasi sehingga menyebabkan ketidakselarasan di antara subsistem dalam sistem agribisnis. Hal ini sangat merugikan, terutama dalam kerangka perolehan devisa melalui

ekspor karena sampai saat ini peningkatan nilai tambah produk melalui agroindustri masih sangat kecil peranannya (kurang dari 27%).

11. Sebagian besar pelaku agribisnis tidak mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi dan jiwa kewirausahaan yang besar untuk mengantarkan usaha yang dikelolanya menjadi usaha yang berhasil dan mampu tumbuh secara cepat. Di lain pihak, kemampuan manajerial adalah salah satu prasyarat utama untuk mampu memenangkan persaingan global.
12. Kemampuan pasokan modal sendiri dari pelaku agribisnis Indonesia sangat kecil sehingga tidak mampu bertumbuh atas kemampuan sendiri sehingga dibutuhkan modal dari luar. Di lain pihak, kepercayaan para pemodal untuk bermitra juga sangat lemah karena tidak adanya kepastian usaha yang menguntungkan.
13. Kemampuan dalam memilih dan menerapkan teknologi bagi para pelaku agribisnis masih sangat rendah sehingga petani pada dasarnya selalu membutuhkan bimbingan dan pendamping yang kompeten dan selalu berada di tempat.
14. Aksesibilitas para pelaku agribisnis terhadap informasi pemasaran sangat kecil sehingga membutuhkan mitra yang memiliki pengalaman dan akses pasar yang luas. Hal ini khususnya sangat penting bagi kegiatan pemasaran produk hortikultura ke luar negeri.

Hampir semua pelaku agribisnis konvensional belum mampu menggeser paradigma sebagai petani subsisten ke petani unggulan yang berorientasi bisnis. Hal ini pada umumnya berbeda dengan pelaku agribisnis swasta yang biasanya telah menerapkan sistem agribisnis secara lebih konsekuen dan ditekuni secara konsisten.

Dalam upaya mengelola semua kegiatan yang berada dalam ruang lingkup sistem agribisnis agar sinergi dan sesuai dengan rencana, diperlukan penerapan berbagai prinsip manajemen yang baku pada praktek-praktek agribisnis atau agroindustri. Namun demikian, mengingat agribisnis sifatnya unik maka diperlukan berbagai terobosan dan keterampilan yang unik pula dari para manajernya. Downey dan Erickson dalam Gumbira-Sa'id (2002) menyebutkan 11 hal penting yang menjadi alasan mengapa pengelolaan agribisnis menjadi bersifat khusus, seperti yang dipaparkan di bawah ini.

1. Sektor agribisnis sangat kaya dengan jenis bisnis yang dapat dilaksanakan, mulai dari lahan pertanian sampai ke transportasi laut

- (pengapalan), pengolah, makelar, pengecer, pengepak, perusahaan-perusahaan penyimpanan (gudang), restoran.
2. Pada dasarnya berjuta-juta bisnis yang berbeda bermunculan untuk menangani perpindahan barang dari petani ke konsumen melalui pedagang pengecer.
 3. Pada dasarnya hampir semua agribisnis berhubungan langsung dengan petani produsen pangan dan serat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak ada suatu industri lain pun yang dibangun di sekitar produsen bahan baku berada.
 4. Skala agribisnis sangat berbeda, dari ukuran raksasa sampai ke ukuran rumah tangga, namun sebagian besar agribisnis beroperasi pada skala kecil.
 5. Agribisnis biasanya berskala kecil dan harus bersaing di pasar bebas yang terdiri dari banyak penjual dan sedikit pembeli. Jumlah dan ukuran agribisnis biasanya tidak dapat membentuk suatu perusahaan monopoli. Diferensiasi produk juga sangat sulit terjadi pada berbagai agribisnis tertentu.
 6. Agribisnis cenderung bersifat konservatif dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya karena filosofi hidup para petani yang tradisional.
 7. Agribisnis cenderung berorientasi kepada keluarga. Banyak agribisnis dikelola oleh suatu keluarga. Suami dan istri kadangkala terlalu terlibat pada kegiatan operasi dan pengambilan keputusan sekaligus serta keduanya mempunyai peranan yang sebanding.
 8. Agribisnis juga cenderung berorientasi kepada masyarakat. Banyak di antara masyarakat tersebut bertempat di kota-kota kecil dan pelosok pedesaan, di mana hubungan antarmanusia sangat penting dan persekutuannya bersifat jangka panjang. Di antara individu kenal satu sama lainnya, kenal keluarga satu dengan yang lainnya, bahkan mereka saling mengenal untuk beberapa generasi sebelumnya.
 9. Agribisnis, walaupun dapat menjadi industri raksasa, cenderung bersifat musiman. Berbagai masalah sering timbul karena keadaan alami dari kegiatan penanaman dan pemanenan (contoh: kebun tebu, panen, giling dan ada waktu kosong sekitar enam bulan untuk pabrikasi).
 10. Agribisnis erat hubungannya dengan hukum alam (sunatullah). Kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit merupakan ancaman-ancaman yang setiap saat dapat menerpa agribisnis. Setiap orang yang bergerak di bidang agribisnis. Mulai dari bankir sampai ke produsen

pestisida menyadari bahwa agribisnis sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

11. Agribisnis dipantau dan dikelola oleh pemerintah, mengingat sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak (terutama komoditi pangan).

D. PERANAN AGRIBISNIS ATAU AGROINDUSTRI SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN NASIONAL

Kegiatan agribisnis atau agroindustri di Indonesia saat ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Setidaknya sekitar 14,6% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihasilkan dari sektor agribisnis *on-farm* dan sekitar 20% lagi dihasilkan dari sektor industri pengolahan termasuk agroindustri (BPS, 2004). Kinerja pertumbuhan perekonomian hingga akhir tahun 2004 yang lalu mencapai 6% hingga 7% (dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian yang hanya mencapai 4,4% pada akhir tahun 2003) (BPS, 2004). Di lain pihak, tingkat pertumbuhan kredit perbankan nasional mampu mencapai 24,7% pada akhir September 2004 yang lalu. Dilandasi oleh kondisi tersebut, kinerja sektor industri pengolahan diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya pula dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih optimal (Edward, 2004). Indikator kinerja perekonomian yang membaik tidak hanya ditampilkan melalui tingkat suku bunga perbankan yang stabil pada kisaran antara 11% hingga 12%, tetapi juga melalui pertumbuhan nilai total ekspor yang hingga akhir bulan September 2004 (USD 50,7 miliar) yang lalu meningkat 10,77% dari nilai ekspor pada akhir bulan September 2003 (USD 45,8 miliar). Kontribusi nilai ekspor terbesar dihasilkan dari sektor non-migas, yaitu 77% dari total nilai ekspor (salah satunya diakibatkan oleh peningkatan permintaan atas tekstil, kain dan furniture dari pasar di Eropa), sedangkan sisanya berasal dari sektor minyak dan gas, yaitu 23% (CIC, 2004).

Di lain pihak, dalam beberapa tahun ke depan, integrasi perekonomian negara-negara di Asia Tenggara dengan perekonomian global diperkirakan akan mendorong terjadinya integrasi perekonomian regional di wilayah tersebut. World Bank (2004) menginformasikan bahwa peningkatan ekspor dari negara-negara di Asia Tenggara secara langsung maupun tidak langsung juga telah berakibat pada peningkatan impor karena interaksi global telah mengakibatkan meningkatnya permintaan lokal terhadap produk-produk impor. Ditinjau dari segi perdagangan global, nilai neraca ekspor impor

Indonesia masih positif (Rp28,4 miliar pada tahun 2003 yang lalu) (WTO, 2004). Akan tetapi, pertumbuhan ekspornya masih lebih tinggi (7%/tahun) dibandingkan dengan pertumbuhan impornya (4%/tahun), perubahan nilai ekspor Indonesia dinilai tidak signifikan, jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, seperti Republik Rakyat Cina (34%/tahun), Korea Selatan (19%/tahun), Thailand (17%/tahun), Singapura (15%/tahun), Hong Kong (13%/tahun) dan Vietnam (22%/tahun) (Tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Daftar beberapa Negara Eksportir dan Importir di Dunia,
Tahun 2003

Peringkat	Negara	Nilai (USD milyar)	Persentase Perubahan (%)	Peringkat	Negara	Nilai (USD milyar)	Persentase Perubahan (%)
1	Jerman	748,3	22	1	Amerika Serikat	1303,1	9
2	Amerika Serikat	723,8	4	2	Jerman	601,7	23
3	Jepang	471,8	13	3	RR Cina	413,1	40
4	RR Cina	437,9	34	4	Inggris	390,8	13
5	Perancis	386,7	17	5	Perancis	390,5	19
6	Inggris	304,6	9	6	Jepang	382,9	14
7	Belanda	294,1	20	7	Italia	290,8	18
8	Italia	292,1	15	8	Belanda	262,8	20
9	Kanada	272,7	8	9	Kanada	245,0	8
10	Belgia	255,3	18	10	Belgia	235,4	18
	Hong Kong	228,7	13	11	Hong Kong	233,2	12
12	Korea Selatan	193,8	19	13	Korea Selatan	178,8	18
16	Singapura	144,1	15	15	Singapura	127,9	10
20	Malaysia	99,4	7	19	Australia	89,1	23
24	Thailand	80,5	17	21	Malaysia	81,9	3
26	Australia	71,5	10	22	Thailand	75,8	17
30	Indonesia	61,0	7	36	Filipina	39,5	6
37	Filipina	36,5	0	41	Indonesia	32,6	4
49	Vietnam	20,2	22	43	Vietnam	24,9	31

Sumber: WTO (2004).

Di lain pihak, senada dengan implementasi konsep daya saing dan keunggulan kompetitif di dalam perdagangan global, aspek-aspek penciptaan nilai tambah pun dipandang sebagai faktor penting untuk mempertahankan eksistensi agribisnis atau agroindustri nasional dalam menghadapi perdagangan global. Grievink *et.al.* (2002) dalam Forsman (2004) mengungkapkan adanya enam karakteristik pengembangan sektor agribisnis atau agroindustri, yakni (1) pemusatan dan globalisasi industri pangan dan ritel secara berkesinambungan, (2) pertumbuhan kekuatan sektor ritel,

(3) globalisasi dan individualisasi sebagai *trend* konsumen kunci, (4) munculnya kekuatan teknologi sebagai faktor kunci kesuksesan industri pangan, serat dan ritel, (5) kecenderungan perluasan kekuasaan pemimpin pasar atas kompetisi industrinya, serta (6) munculnya agribisnis atau agroindustri sebagai bisnis yang sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan konsumen. Peningkatan pemenuhan konsumsi produk-produk pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dipacu untuk mampu menciptakan bahkan meningkatkan nilai tambah produk, terutama apabila hal tersebut dilakukan terhadap bisnis-bisnis yang berskala kecil dan menengah, yang kebanyakan beroperasi di wilayah pedesaan. Dengan melakukan peningkatan derajat produksi di tingkat *on-farm*, petani diharapkan mendapatkan harga jual yang lebih baik daripada hanya menghasilkan produk secara konvensional. Pada kondisi inilah pengembangan agribisnis atau agroindustri di pedesaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dikembangkan, terutama melalui proses peningkatan nilai tambah.

Merujuk pada Pryor dan Holt (1998) mengenai pangsa agribisnis dalam pembangunan ekonomi beberapa negara (Tabel I-1.2), terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian Indonesia terhadap PDB adalah 20%, kontribusi manufaktur dan jasa pertanian 50% dan terhadap seluruh agribisnis adalah 63%. Di lain pihak, Thailand yang kontribusi sektor pertaniannya terhadap PDB hanya 11%, ternyata mampu menghasilkan kontribusi sektor manufaktur dan jasa dalam agribisnis yang lebih besar, yakni 79%, mencirikan bahwa pengembangan sektor agribisnis atau agroindustri di Thailand cukup baik dan modern, sedangkan di Indonesia masih konvensional. Hal ini semakin terbukti lagi apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki kontribusi pertanian pada PDB yang hanya 1%, tetapi memiliki pangsa sektor manufaktur dan jasa dalam agribisnis yang sangat tinggi, yakni 91%.

Tabel 1.2.
Pangsa Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi beberapa Negara
(Agribisnis melingkup sektor Pertanian dan Manufaktur
serta Jasa yang Berhubungan dengan Pertanian)

Negara	Pangsa terhadap PDB (%)			Pangsa Sektor Manufaktur dan Jasa dalam Agribisnis (%)
	Sektor Pertanian	Manufaktur dan Jasa Pertanian	Seluruh Agribisnis	
Filipina	21	50	71	70
India	27	41	68	60
Thailand	11	43	54	79
Indonesia	20	33	53	63
Malaysia	13	36	49	73
Korea Selatan	8	36	44	82
Chili	9	34	43	79
Argentina	11	29	39	73
Brazil	8	30	38	79
Meksiko	9	27	37	75
Amerika Serikat	1	13	14	91

Sumber: Pryor dan Holt (1998).

Meskipun telah menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan dengan pertumbuhan yang positif pada masa pasca-krisis, tetapi tanpa pengelolaan yang lebih baik dan lebih serius, produk-produk agribisnis Indonesia akan sulit bersaing dengan produk-produk agribisnis dari negara-negara pesaing sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah yang cukup besar terhadap eksistensi produk-produk agribisnis Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berbagai persoalan pangan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti terancamnya ketahanan pangan akibat pasokan pangan dalam negeri yang tidak selalu mampu mencukupi jumlah kebutuhan yang ada; kegagalan produksi pangan akibat bencana alam; tingkat impor bahan pangan yang relatif tinggi; impor ilegal (aktivitas penyelundupan dan manipulasi dokumen (*under-invoice*) yang merugikan negara, baik dalam bentuk jumlah maupun harganya); tingkat kepemilikan lahan (*land holding capacity*) yang sangat rendah (kurang dari 0,25 ha); harga BBM yang semakin mahal; kredit perbankan dengan suku bunga yang relatif memberatkan petani maupun UKM; kesulitan peningkatan produksi atau produktivitas beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai maupun tanaman pangan pokok lainnya; serta mekanisasi dan pola tanam yang tidak mungkin dilakukan secara serentak (Suwandi, 2002 *dalam* Gumbira-Sa'id dan Dewi, 2004).

Dengan memperhatikan status produksi pangan tersebut, terdapat beberapa hal mendasar yang harus dikerjakan oleh Indonesia. **Strategi yang pertama** adalah mengoptimalkan swasembada pangan, dalam arti seluruh daya dan upaya harus dikerahkan lagi untuk meningkatkan produksi pangan utama domestik. Seluruh komoditas pangan utama yang telah dibahas di depan, yakni beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang kedelai dan kacang tanah harus ditingkatkan produksinya. Kiat swasembada pangan tersebut harus semakin digalakkan kembali (minimal mencapai rasio pangan-penduduk sebesar 0,42 kembali) pada saat GNP per kapita masih rendah dan cadangan negara yang juga rendah.

Strategi kedua dalam pengembangan agribisnis Indonesia adalah menggalakkan produksi komoditas dan produk yang bernilai tinggi, yang mudah ditransportasikan dan diperdagangkan, seperti produk-produk hortikultura (buah, sayuran, dan bunga potong) dan perikanan. Orientasi produksi tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, tetapi juga untuk ekspor.

Strategi yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penanganan pasca panen. Dalam agribisnis Indonesia kehilangan pascapanen biji-bijian masih berada di atas 15%, untuk buah-buahan sampai mencapai 20%, sedangkan untuk sayur-sayuran sampai mencapai 40%. Dalam hal inilah kinerja sektor agroindustri harus dipacu sebaik mungkin sehingga kehilangan pascapanen menjadi minimal dan nilai tambah produk dapat ditingkatkan.

Strategi yang keempat adalah melakukan penganeekaragaman pangan dan menggalakkan pemasaran, khususnya untuk komoditas-komoditas yang berbahan baku produksi dalam negeri, seperti ubi kayu, ubi jalar, sukun, garut, jagung, kentang sehingga mampu menghela peningkatan produksi nasional. Kebijakan diversifikasi pangan tersebut sebaiknya mencontoh keberhasilan yang dicapai oleh komoditas terigu, yang semakin berakar kuat di Indonesia, walaupun bahan bakunya harus diimpor. Melalui keberhasilan penganeekaragaman pangan yang dipacu pertumbuhannya oleh sektor agroindustri pangan maka peluang untuk memperoleh devisa pun akan semakin besar.

Strategi yang kelima adalah mendorong kegiatan agroturisme yang berorientasi pada lingkungan yang lestari. Strategi tersebut tidak akan mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi akan mampu menggaet nilai tambah dan devisa, melalui jasa dan pelayanan agro dan ekoturisme, perhotelan, rumah makan dan industri katering.

Strategi yang keenam adalah melakukan perbaikan akses dan hubungan dengan pasar dan bagian dunia lainnya yang potensial. Mencontoh keberhasilan agribisnis Taiwan, Thailand dan Belanda maka yang harus dikembangkan di Indonesia adalah pasar-pasar induk swasta di berbagai wilayah produksi sehingga komoditas dan produk yang bermutu tinggi dapat dipasarkan dengan harga yang lebih baik, termasuk ke pasar global.

Di lain pihak, peluang yang terbesar bagi kegiatan dan pengembangan investasi di sektor agribisnis atau agroindustri di Indonesia saat ini adalah pada tiga fokus kegiatan di bawah ini.

1. Pengembangan dan penyebarluasan teknologi modern. Keberhasilan agribisnis di Taiwan dan Thailand ternyata lebih banyak didorong oleh kinerja swasta, bukan oleh kinerja pemerintah. Di Thailand sendiri perusahaan domestik yang kini menjadi raksasa global, Charoen Pokphand, merupakan investasi swasta murni yang mendapatkan penghargaan dan citra sosial yang tinggi di masyarakatnya.
2. Kegiatan penelitian dan pengembangan pengolahan dan pengemasan, dalam upaya menganeekaragamkan produk dan meningkatkan nilai tambah komoditas primer.
3. Peningkatan mutu produk ekspor. Dalam hal inilah sumber daya utama Indonesia yang sangat potensial, yakni di sektor perikanan, perkebunan dan tanaman hortikultura perlu diorientasikan pada peningkatan mutu produk yang tinggi dan pasar global.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa sektor agribisnis pangan sangat penting dan dipandang memiliki berbagai keunikan!
- 2) Kemukakan dan terangkan cakupan agribisnis pangan serta subsistem-subsistem yang terlibat di dalamnya!
- 3) Kemukakan faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan kerangka analisis mikro sistem agribisnis!
- 4) Jelaskan 11 hal penting yang menjadi alasan mengapa pengelolaan agribisnis bersifat khusus!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal latihan di atas, Anda harus mempelajari kembali Kegiatan Belajar 1 tentang Pengenalan Sistem Agribisnis Pangan.



RANGKUMAN

1. Agribisnis merupakan sejumlah kegiatan yang dilibatkan dalam proses manufaktur dan distribusi input produksi, budidaya komoditas di lini *on-farm*, pengolahan produk, proses pengemasan dan penyimpanan, hingga proses pemasaran serta distribusi komoditas dan produk-produk yang dihasilkan dari proses pengolahan komoditas tersebut.
2. Keterkaitan antara subsistem-subsistem agribisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Agribisnis disusun oleh sub sistem-sub sistem berikut ini, kecuali subsistem
 - A. pemasaran
 - B. pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi
 - C. pengolahan atau agroindustri
 - D. pengembangan produk baru
- 2) Faktor internal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan agribisnis atau agroindustri, seperti
 - A. aktivitas pengadaan input, proses pengolahan, dan karakteristik bahan baku
 - B. proses pengolahan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi dan personalia
 - C. penelitian dan pengembangan, keuangan, serta tenaga kerja
 - D. tenaga kerja, dana investasi, dan preferensi konsumen

- 3) Permasalahan yang dihadapi agribisnis di Indonesia antara lain adalah
- A. terjadinya fragmentasi kepemilikan dan penguasaan lahan yang terus-menerus sehingga luas lahan yang dimiliki dan dikelola petani semakin meningkat
 - B. efektivitas sistem distribusi input petani terutama untuk komoditas pangan dan hortikultura yang semakin meningkat
 - C. petani mampu menerapkan teknik budidaya yang baik dalam pengelolaan usaha tani karena sistem penyuluhan dan komunikasi pertanian yang ada berjalan kurang efektif
 - D. dibutuhkannya modal dari luar karena rendahnya kemampuan pasokan modal sendiri sehingga tidak mampu bertumbuh di atas kemampuan sendiri
- 4) Berikut ini merupakan keunikan dari pengelolaan agribisnis, *kecuali*
- A. diferensiasi produk sangat sulit terjadi pada beberapa agribisnis tertentu
 - B. berorientasi pada keluarga dan masyarakat
 - C. agribisnis dapat menjadi industri raksasa dan tidak bersifat musiman
 - D. agribisnis sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca
- 5) Kondisi berikut ini sangat mendukung pengembangan agribisnis atau agroindustri di pedesaan, *kecuali*
- A. peningkatan nilai tambah produk melalui pemanfaatan sumber daya lokal
 - B. peningkatan pemenuhan konsumsi produk yang tersentral di perkotaan
 - C. pemenuhan konsumsi produk melalui pemanfaatan sumber daya lokal
 - D. peningkatan derajat produksi di tingkat *on farm*
- 6) Kendala yang tidak dihadapi produk agribisnis Indonesia untuk bersaing dengan produk agribisnis dari negara pesaing adalah
- A. meningkatnya kapasitas kepemilikan lahan
 - B. mekanisasi dan pola tanam yang tidak mungkin dilakukan secara serentak
 - C. produktivitas tanaman pangan pokok yang sulit ditingkatkan
 - D. pasokan pangan dalam negeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

- 7) Strategi mendasar yang harus dilakukan Indonesia untuk mempertahankan status produksi pangannya, antara lain
- A. memfokuskan orientasi produksi untuk pasar domestik
 - B. meminimalisasi tingkat kehilangan produk sehingga peningkatan nilai tambah produk dapat ditekan
 - C. mendorong kegiatan agroturisme yang berorientasi pada lingkungan yang lestari
 - D. pengembangan pasar-pasar induk hanya di wilayah-wilayah konsumsi
- 8) Fokus kegiatan pengembangan agroindustri di Indonesia, *kecuali*
- A. peningkatan mutu produk ekspor
 - B. peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan
 - C. penganekaragaman produk melalui pembatasan aktivitas penelitian
 - D. pengembangan dan penyebarluasan teknologi modern

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Ekonomi Pangan

A. EKONOMI

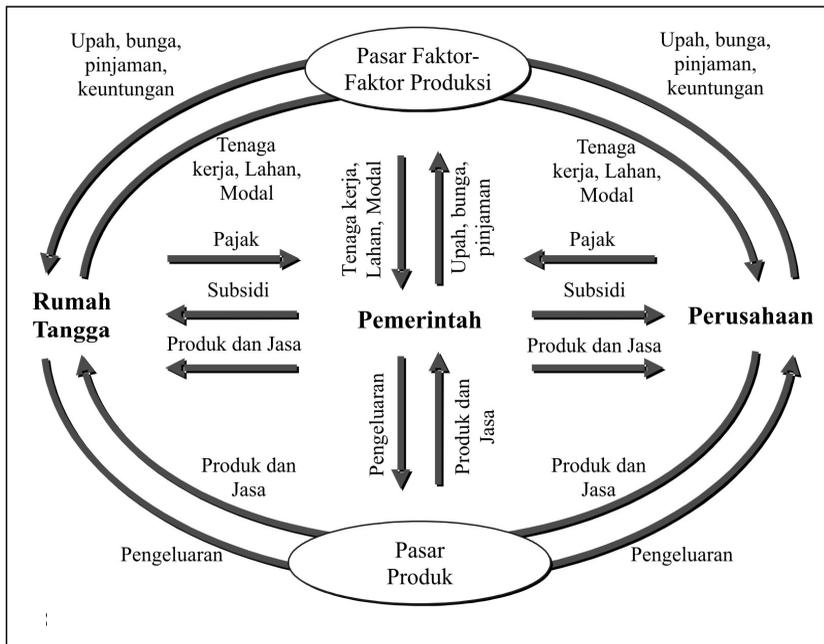
Ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegunaan yang tidak terbatas. Mekanisme tersebut sesungguhnya menggambarkan tiga hal, yakni (1) produk (Apa) yang akan dihasilkan dan (Berapa) banyak kuantitas produk yang ingin dihasilkan, (2) (Bagaimana) cara menghasilkan produk atau jasa yang beragam, serta (3) (Untuk siapa) berbagai produk atau jasa tersebut dihasilkan.

Untuk memahami cara kerja sistem perekonomian, terdapat beberapa faktor yang harus diidentifikasi, termasuk pula interaksi yang terjadi di antara masing-masing faktor tersebut. Bagian-bagian yang membentuk ekonomi dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni (1) pembuat keputusan (pihak-pihak/sekelompok orang/organisasi yang bertanggung jawab dalam menentukan pilihan), dan (2) mekanisme koordinasi (pengaturan yang dilakukan agar pilihan keputusan yang diambil oleh suatu pihak atau organisasi atau perusahaan sesuai dengan pilihan dari pihak-pihak lainnya) (Parkin, 1990).

1. Pihak-pihak Pengambil/Penentu Keputusan

Dalam hal ini, yang termasuk pihak-pihak pengambil keputusan adalah (a) rumah tangga, (b) perusahaan dan (c) pemerintah. Rumah tangga merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama sebagai sebuah unit pembuat keputusan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan ditemukannya beberapa rumah tangga yang terdiri dari hanya satu orang, maupun beberapa orang atau kelompok yang satu sama lain tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Perusahaan merupakan organisasi penghasil produk dan jasa. Beberapa contoh yang termasuk perusahaan ditinjau dari ilmu ekonomi di antaranya petani, bank, pengolah bahan baku menjadi barang jadi, perusahaan asuransi. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki dua fungsi, yakni sebagai penjamin pendistribusian produk dan jasa pada konsumen serta pendistribusian kembali pendapatan dan kesejahteraan. Beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh pemerintah adalah kekuatan

hukum, fasilitas kesehatan publik, serta biaya transportasi dan pendidikan (Gambar 1.3).



Sumber: Parkin (1990).

Gambar 1.3.
Ruang Lingkup Ekonomi

Selain itu, terdapat faktor-faktor produksi (sumber daya produktif dalam ekonomi) yang harus diperhatikan, yakni tenaga kerja, lahan dan modal. Tenaga kerja dinyatakan sebagai kekuatan pikiran dan kekuatan fisik (otot) dari manusia. Lahan dinyatakan sebagai bagian dari sumber daya alam, sedangkan modal direpresentasikan oleh mesin dan peralatan, bangunan, serta aspek-aspek lainnya yang dapat digunakan dalam proses pengolahan produk. Dalam hal ini, rumah tangga menjual atau menyewakan faktor-faktor produksi pada pihak-pihak perusahaan ataupun pemerintah. Pihak rumah tangga memperoleh pendapatan dari penjualan atau penyewaan faktor-faktor produksi tersebut. Selain itu, pihak rumah tangga mendapatkan beberapa

manfaat dari pelayanan pemerintah untuk masyarakat, meskipun sebagai konsekuensinya memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada pemerintah. Dengan pendapatan yang diperolehnya, rumah tangga akan mengonsumsi produk maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pihak perusahaan menyewa atau membeli faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan menentukan pilihan cara yang akan digunakan untuk memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut dalam menghasilkan produk atau jasa. Dalam hal ini, pihak perusahaan pengolah berhak menentukan produk atau jasa yang ingin dihasilkan dalam kuantitas tertentu. Pengeluaran rumah tangga dan pemerintah untuk mengonsumsi produk atau jasa diperoleh perusahaan. Kemudian, perusahaan tersebut menggunakan sebagian dari jumlah penerimaannya untuk membayar faktor-faktor produksi yang diperolehnya dari rumah tangga. Di lain pihak, perusahaan memperoleh subsidi dari pemerintah, sekaligus membayar pajak usahanya pada pemerintah. Pemerintah menentukan skala pembelian faktor-faktor produksi dari rumah tangga dan jumlah produk maupun jasa dari perusahaan. Pemerintah juga menentukan besaran pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan, serta subsidi yang harus diberikan pada kedua pihak tersebut (Gambar 1.3).

2. Mekanisme Koordinasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme koordinasi adalah pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Koordinasi yang kemudian muncul dalam bentuk interaksi hanya akan terjadi apabila terdapat lebih dari dua pihak yang saling membutuhkan. Sebagai contoh, rumah tangga akan memilih dan menentukan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, serta tipe pekerjaan apa yang akan dipilih. Di lain pihak, perusahaan akan menentukan tipe dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk dipekerjakan dalam menghasilkan berbagai produk maupun jasa (rumah tangga menentukan tipe dan kuantitas tenaga kerja yang akan dijual, sedangkan perusahaan menentukan tipe dan jumlah tenaga kerja yang ingin dibelinya). Pemerintah menetapkan pilihan-pilihan terhadap unsur-unsur pajak, keuntungan, subsidi, serta penentuan produk dan jasa. Pajak yang ditentukan oleh pemerintah berdampak terhadap jumlah pendapatan rumah tangga dan perusahaan yang dapat disimpan. Keputusan mengonsumsi atau menyimpan sejumlah sumber daya oleh perusahaan dan rumah tangga juga ditentukan oleh tipe dan kuantitas produk maupun jasa

yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan raya dalam kondisi yang lebih baik daripada kondisi infrastruktur rel kereta api maka konsumen (rumah tangga dan perusahaan) akan lebih banyak memilih memanfaatkan infrastruktur jalan raya yang disediakan oleh pemerintah. Konsistensi dari mekanisme yang telah diungkapkan tersebut dibangun oleh koordinasi pilihan ekonomi individu yang meliputi (a) mekanisme perintah (*command mechanism*), serta (b) mekanisme pasar (*market mechanism*).

Mekanisme perintah adalah metode untuk menentukan apa, bagaimana serta untuk siapa produk dan jasa dihasilkan berdasarkan otoritas pemerintah. Mekanisme pasar adalah metode untuk menentukan apa, bagaimana dan untuk siapa produk dan jasa dihasilkan berdasarkan pilihan-pilihan individu yang dikoordinasikan di dalam pasar. Dalam hal ini, pasar adalah tempat di mana setiap individu bertemu untuk melakukan kegiatan jual beli produk dan jasa maupun faktor-faktor produksi. Sebagai contoh, pasar CPO dunia. Pasar CPO dunia tidak mengacu pada nama dari suatu lokasi. Pasar CPO dunia menunjukkan adanya berbagai institusi, pembeli, penjual, *broker* dari berbagai lokasi di dunia yang berkeinginan untuk membeli atau menjual CPO. Pasar CPO dinyatakan terbentuk oleh mekanisme koordinasi karena pasar tersebut menyatukan pengambilan keputusan dari setiap pihak untuk menjual atau membeli produk (CPO). Dalam kondisi globalisasi, pihak-pihak yang menjadi pembeli atau penjual tidak harus berada atau bertemu pada lokasi yang sama untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas komunikasi dalam melakukan interaksi langsung antara pembeli dengan penjual.

Pasar diklasifikasikan berdasarkan tipe-tipe produk atau jasa yang diperdagangkan di dalamnya. Pasar yang menjual produk dan jasa disebut sebagai pasar produk (*goods markets*), sedangkan pasar yang menjual faktor-faktor produksi disebut sebagai pasar faktor produksi (*factors markets*). Kedua jenis pasar tersebut memungkinkan kegiatan perencanaan konsumsi-produksi maupun interaksi antara rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah dapat dikoordinasikan secara konsisten (Gambar 1.3).

Pasar mengkoordinasikan pemilihan keputusan dari masing-masing individu melalui mekanisme penambahan atau penurunan harga. Sebagai contoh adalah kondisi di pasar roti (pangan modern). Pada kondisi di mana kuantitas roti yang ditawarkan untuk dijual pada konsumen lebih sedikit dibandingkan dengan kuantitas individu yang ingin membeli roti tersebut

maka akan terdapat sebagian individu yang tidak memperoleh roti yang diinginkan. Agar terdapat kesesuaian antara penawaran roti dari para penjual dengan permintaan konsumsi roti dari para pembeli maka pembeli harus menurunkan selernya dan kuantitas roti yang ditawarkan untuk dijual harus lebih banyak. Harga roti yang lebih tinggi akan mengakibatkan produsen roti berani menjual produk rotinya dalam kuantitas yang lebih banyak. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, pada tingkat harga yang sama, beberapa orang konsumen akan mengganti pilihannya untuk membeli jenis makanan lain yang harganya lebih murah daripada roti, misalnya mengalihkan konsumsinya dari roti menjadi kue-kue tradisional. Sebaliknya, jika kuantitas roti yang ditawarkan melebihi kuantitas konsumen yang ingin mengonsumsi roti maka harga jual roti tersebut menjadi terlalu tinggi. Harga jual roti yang lebih rendah akan mengakibatkan produsen roti menurunkan produksinya, sedangkan konsumen justru akan meningkatkan konsumsi rotinya.

B. RUANG LINGKUP EKONOMI PANGAN DAN AGRIBISNIS

Agribisnis, dalam hal ini difokuskan pada pangan, merupakan bidang yang sangat heterogen karena sistemnya tidak hanya dibangun oleh para petani di lahan, tetapi juga perusahaan-perusahaan agroindustri pangan, institusi-institusi penyedia kredit dan input produksi, pihak-pihak pemasar dan pengolah produk, jaringan transportasi, pedagang besar (*wholesaler*), ritel, serta para konsumen, baik dalam bentuk individu maupun golongan atau kelompok bisnis (Cramer dan Jensen, 1994). Saat ini, hampir setengah dari total penduduk dunia, terutama yang tinggal di belahan bumi bagian selatan memperoleh sebagian besar kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi lokal. Dalam menghadapi proses globalisasi, lokalisasi tersebut dinyatakan sebagai proses desentralisasi yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian, yang menggeser pola bisnis, dari bisnis-bisnis berskala besar ke arah bisnis-bisnis berskala kecil dan menengah. Melalui cara tersebut, diharapkan akan muncul keseimbangan antara produksi lokal dengan kegiatan perdagangannya dan diversifikasi aktivitas-aktivitas ekonomi serta sedapat mungkin mempersingkat jarak antara produsen dengan konsumen. Selain itu, dengan adanya sistem pangan global, penduduk di dunia mau tidak mau diperkenalkan pada pola makan yang serupa. Dengan demikian, diduga telah terjadi homogenisasi selera dan kebiasaan konsumsi, yang berdampak terhadap kegiatan produksi tanaman pangan secara monokultur, mekanisasi

pengelolaan lahan pertanian, transportasi jarak jauh, serta penyimpanan produk jangka panjang. Dalam hal inilah isu-isu global yang berhubungan dengan kesadaran terhadap mutu pangan menjadi semakin luas disadari oleh penduduk dunia (Hodge dan Gorelick, dalam <http://www.isec.org.uk/articles/bringing.html>, diakses tanggal 3 April 2005).

Dalam menghadapi isu pangan global, proses lokalisasi produksi menjadi semakin penting karena selain dapat mempertahankan mutu produk, masalah biaya produksi yang tinggi akibat jarak distribusi yang jauh pun dapat direduksi. Dengan demikian, apabila hal tersebut dapat dikelola dengan baik, bukannya tidak mungkin jika suatu negara akan dapat menciptakan ketahanan pangan dan keamanan pangan dari komoditas-komoditas atau produk-produk pangan yang dihasilkannya sendiri. Hal tersebut akan memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian negara, baik ditinjau dari fungsi-fungsi permintaan dan penawaran, sistem agribisnis atau agroindustri pangan, sistem dan mekanisme pemasaran maupun kompetisi dan pengelolaan industri pangan.

1. Definisi Ekonomi Pangan

Pembahasan mengenai ekonomi pangan sering kali dimulai dari asumsi pengaruh para pemain utama dalam pasar pangan. Meskipun demikian, modernisasi swapasokan (*self supply modernization*) tidak hanya ditunjukkan oleh perbaikan kesehatan dan lingkungan saja. Sebagai gambaran, pangan yang diproduksi secara besar-besaran untuk pasar masal dihasilkan dalam jumlah yang besar sehingga sangat memungkinkan menjadi penyebab dalam berbagai permasalahan lingkungan secara global. Keragaman tanaman pangan dapat mengalami penurunan, sedangkan sistem monokultur mengakibatkan meningkatnya penyebaran hama dan penyakit, yang berujung pada meningkatnya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam upaya membasmi hama dan penyakit pada tanaman pangan.

Davey (1999) mengungkapkan adanya sejumlah ketidaksempurnaan dalam pengoperasian pasar komoditas pangan. Perekonomian pada titik penjualan akhir dan pada titik input petrokimia (terutama pupuk) diduga memberikan dampak yang cukup besar pada ketersediaan pasokan pangan. Di lain pihak, isu ekonomi yang berkembang akhir-akhir ini mengungkapkan bahwa pasar akan menciptakan pilihan ekonomis secara optimal. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat diyakini sepenuhnya, mengingat proses budidaya, pengolahan dan distribusi produk-produk pangan semakin banyak

dikuasai oleh negara-negara produsen maju yang skala produksinya sangat besar. Dengan demikian, pada akhirnya cenderung memanfaatkan biaya eksternal terhadap komunitas lingkungan yang kondisi perekonomiannya berada di bawah standar perekonomian negara-negara besar di atas.

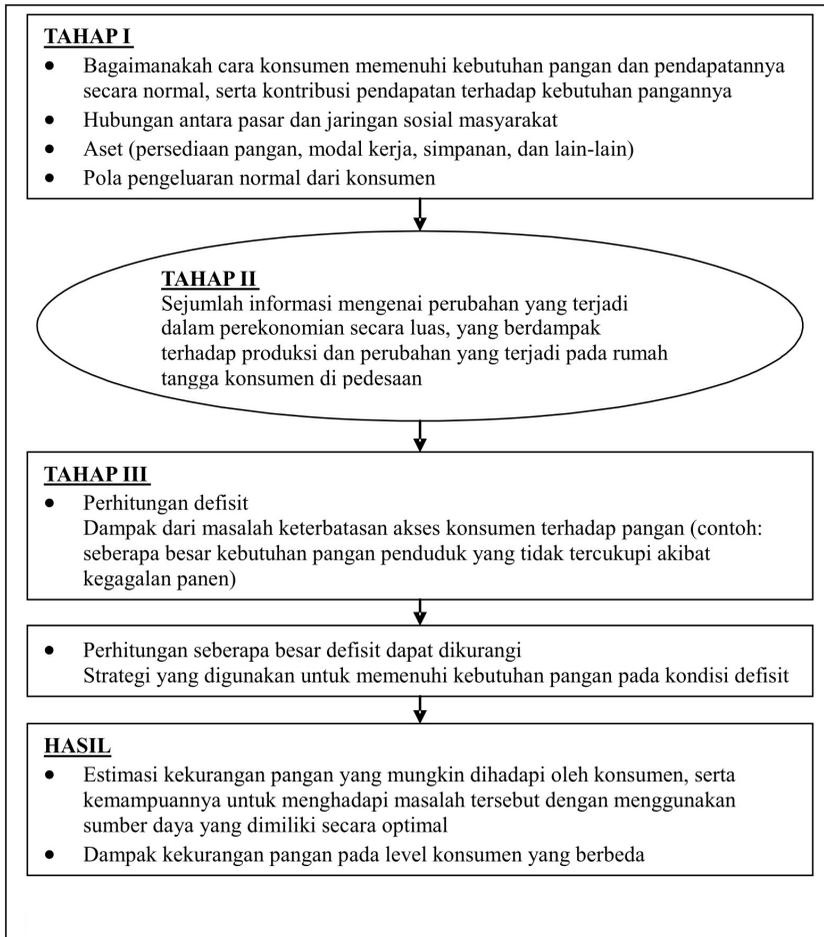
Ekonomi pangan merupakan aplikasi ekonomi dan manajemen dalam bidang industri, perdagangan dan pelayanan pangan. Di dalam kerangka ekonomi pangan, rantai pangan digambarkan mulai dari penyediaan bibit bahan pangan (tanaman maupun hewan), kemudian dibudidayakan, diolah menjadi produk-produk yang bernilai tambah, hingga dikonsumsi oleh konsumen. Pendekatan ekonomi pangan merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis ketahanan pangan, yang fokusnya diarahkan pada proses identifikasi dan kuantifikasi akses terhadap ketersediaan pangan sehingga dengan memahami ekonomi pangan diharapkan dapat pula dipahami respon-respon dan fungsi-fungsi apa saja yang dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan-perubahan di sektor pangan. Dalam hal ini, yang penting untuk dipahami adalah bagaimana cara konsumen memperoleh akses terhadap pangan secara normal sehingga dapat berperan dalam mempermudah pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada indikator-indikator kunci ketahanan pangan.

Sehubungan dengan pencapaian ketahanan pangan, Maxwell (2003) mengungkapkan adanya model aset yang harus dimiliki dalam suatu agribisnis pangan. Aset-aset atau modal-modal tersebut adalah modal sumber daya alam (*natural capital*), modal sosial (*social capital*), modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), serta modal finansial (*financial capital*). Modal sumber daya alam adalah kekayaan alam yang secara bebas dapat diperoleh dari alam, dalam bentuk bahan pangan, air, asimilasi dan dekomposisi limbah, nutrisi tanah, pengendalian hama secara biologis, pengaturan iklim, kehidupan habitat liar, perlindungan dari bencana alam. Modal sosial adalah kohesifitas individu di dalam masyarakatnya, yang menciptakan hubungan kerja sama, aturan dan norma, yang membentuk sikap dan hubungan dalam masyarakat. Modal sumber daya manusia adalah status sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kesehatan, tingkat pendidikan, keahlian, wawasan, kemampuan berinteraksi, mengadaptasi dan menciptakan teknologi, serta segala akses yang menghubungkan sumber daya manusia dengan institusi-institusi pengembang sumber daya manusia. Modal fisik lebih ditunjukkan dalam bentuk infrastruktur lokal, pasokan energi, fasilitas komunikasi, ketersediaan pasar, serta alat transportasi. Modal

finansial lebih mengarah pada persediaan uang, kemudahan akses kredit, subsidi dan sistem pembayaran yang sesuai.

Dalam kaitannya dengan ekonomi pangan, agribisnis pangan memiliki tiga peranan utama, yang memberikan manfaat pemasaran maupun non pemasaran bagi masyarakat. Ketiga fungsi tersebut diungkapkan oleh Depoele (2000) terdiri atas (1) produksi pangan, pakan dan serat (termasuk pengolahannya di lini *off-farm* atau agroindustri); (2) perlindungan kondisi lingkungan dan lansekap lahan; serta (3) mempertahankan viabilitas lingkungan pedesaan dan menyeimbangkan pembangunan teritorial. Dengan demikian, elemen-elemen yang menjadi kuncinya adalah keseimbangan antara nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologi.

Analisis ekonomi pangan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti evaluasi kebutuhan pangan, rasionalisasi penggunaan bantuan pangan, penentu tanda bahaya awal krisis pangan, pemahaman alasan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, pengembangan kebijakan pangan, dan sebagainya. Analisis ekonomi pangan menurut Boudreau (1998) dapat dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pengembangan pemenuhan pangan (*the baseline picture*), tahap spesifikasi masalah dan tahap analisis skenario (Gambar 1.4). Pada tahap pengembangan pemenuhan pangan, diperlukan informasi mengenai sumber-sumber bahan pangan dan sumber-sumber pendapatan penduduk, termasuk pula pasar, hubungan sosial, aset yang digunakan dan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pada tahap spesifikasi masalah, identifikasi dilakukan terhadap perubahan-perubahan potensial dalam produksi pangan (pertanian), ekonomi dan kondisi keamanan yang berpengaruh terhadap akses konsumen terhadap pangan. Misalnya, kondisi kekeringan di lahan dapat mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 70% dari kondisi normalnya. Pada tahap analisis skenario, kalkulasi atau perhitungan terhadap perubahan-perubahan yang teridentifikasi dalam spesifikasi masalah akan berdampak pada akses rumah tangga atau konsumen yang berbeda terhadap pangan. Di dalam tahapan tersebut, analisis dilakukan dalam bentuk kalkulasi defisit yang diakibatkan oleh perubahan dan kalkulasi seberapa jauh konsumen dapat menanggulangi masalah kekurangan pangan yang dihadapinya (Gambar 1.4).



Sumber: Bodreau (1998).

Gambar 1.4.
Proses Analisis Ekonomi Pangan

2. Model Ekonomi Pangan: Asumsi dan Implikasi

Untuk memahami ekonomi umumnya dan ekonomi pangan khususnya, diperlukan suatu model ekonomi. Model tersebut menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dalam skala yang lebih kecil. Model tersebut juga menunjukkan detail yang lebih sederhana dibandingkan dengan kondisi yang

sesungguhnya. Dalam ekonomi (termasuk pula di dalamnya ekonomi pangan), model tersebut tersusun atas dua komponen, yakni asumsi dan implikasi. Asumsi membentuk dasar dari model yang dibangun dan dikembangkan. Asumsi menunjukkan proposisi mengenai hal-hal apa saja yang penting dan hal-hal lainnya yang dapat diabaikan atau hal-hal apa saja yang tidak mengalami perubahan (kondisi konstan) maupun hal-hal yang dapat digunakan untuk melakukan pendugaan atau prediksi. Di lain pihak, implikasi adalah keluaran yang diharapkan dari suatu model. Hubungan antara asumsi-asumsi model dan implikasinya dinyatakan sebagai proses deduksi logis. Asumsi dari suatu model dipengaruhi oleh tujuan pembuatan model tersebut. Tujuan pembuatan model ekonomi adalah untuk memahami bagaimana setiap individu menentukan pilihan dalam menghadapi kelangkaan produk yang diinginkannya. Berikut ini adalah beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam memahami ekonomi pangan.

a. Masing-masing individu memiliki preferensi yang berbeda-beda.

Para ekonom menggunakan istilah preferensi untuk menunjukkan hal-hal yang disukai atau tidak disukai oleh konsumen. Masing-masing individu dapat menentukan apakah situasi tertentu lebih baik, lebih buruk atau sama baiknya dengan situasi lainnya. Sebagai contoh, setiap individu dapat menentukan apakah mengonsumsi nasi tanpa daging lebih baik, lebih buruk atau sama baiknya dengan mengonsumsi nasi dengan beberapa potong daging.

b. Masing-masing individu dikaruniai keterbatasan sumber daya dan teknologi yang dapat mentransformasikan sejumlah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa.

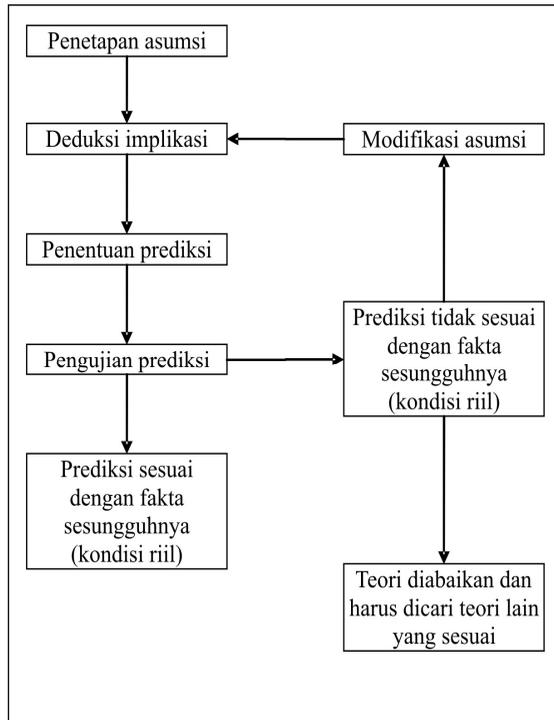
Para ekonom menggunakan istilah karunia untuk menunjukkan sumber daya yang dimiliki, serta istilah teknologi untuk mendeskripsikan metode konversi sumber daya tersebut menjadi produk atau jasa.

c. Tindakan ekonomis setiap individu.

Setiap individu akan menetapkan bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Pilihan yang rasional dalam hal ini merupakan pilihan yang terbaik berdasarkan pandangan dari masing-masing individu yang menetapkan pilihannya. Pilihan-pilihan tersebut disusun berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan memiliki informasi yang lebih lengkap, setiap individu dapat menentukan seberapa tepat pilihan yang dilakukannya.

- d. Pilihan dari setiap individu pasti dikoordinasikan. Pilihan seseorang untuk membeli suatu produk atau jasa pasti disesuaikan dengan pilihan seseorang yang lain untuk menjual produk atau jasa tersebut. Oleh karena itu, tampak bahwa koordinasi dari pilihan-pilihan setiap individu ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar maupun mekanisme perintah atau komando.

Teori-teori ekonomi menjembatani kesenjangan antara model ekonomi dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Teori-teori ekonomi menyatakan bahwa perilaku ekonomi dari setiap individu pada kondisi ekonomi yang aktual dapat diprediksikan dengan menggunakan model pilihan rasional dari interaksi masing-masing individu dalam kondisi keseimbangan. Para ekonom mengembangkan model berdasarkan ide tersebut, yakni ide yang menjelaskan semua aspek dalam perilaku ekonomi. Meskipun demikian, model tersebut masih harus diuji kebenarannya. Untuk menguji tingkat kebenaran dari suatu model ekonomi maka hal yang dapat dilakukan adalah membandingkannya dengan kondisi sebenarnya yang terjadi. Proses perbandingan antara prediksi model ekonomi dengan kondisi yang sesungguhnya diilustrasikan pada Gambar 1.5. Proses tersebut diawali dengan pengembangan model ekonomi. Implikasi model digunakan untuk menetapkan prediksi kondisi ekonomi. Prediksi tersebut beserta pengujiannya membentuk dasar dari teori ekonomi. Pada saat prediksi mengalami persinggungan dengan kondisi yang sesungguhnya maka teori tersebut harus diabaikan untuk memperoleh alternatif lainnya (proses pengembangan teori tersebut diulangi kembali dari awal, yakni dari tahap pengembangan model). Proses tersebut secara berulang dilakukan hingga diperoleh kesesuaian antara model ekonomi yang dikembangkan dengan kondisi riilnya.



Sumber: Parkin (1990).

Gambar 1.5.
Proses Pengembangan Teori Ekonomi

C. KONDISI PANGAN DAN PERTANIAN INDONESIA

Indonesia memiliki potensi pertanian yang masih perlu dikembangkan, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusianya. Pendekatan komoditas yang masih ditujukan pada swasembada pangan (*self sufficiency*) sebaiknya digeser ke arah penciptaan nilai tambah yang berorientasi pada margin keuntungan, selain berorientasi pada ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pada kasus ketersediaan produk pangan, diperlukan adanya proses pengembangan ke arah diversifikasi, pengembangan jenis pangan baru, produksi pangan dan impor pangan, serta peningkatan daya beli masyarakat

melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif dan bernilai tambah tinggi (Gumbira-Sa'id, 2005).

Perkembangan kondisi pertanian khususnya pangan di Indonesia ditampilkan melalui kontribusinya terhadap perekonomian negara. Selama periode 1999-2003, pertanian tampil sebagai sektor yang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Kontribusi agribisnis atau agroindustri di Indonesia terhadap nilai PDB (Atas Dasar Harga Konstan 1993) berkisar antara 16% - 20%, dengan kecenderungan meningkat, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2003, sebesar 19,95%. Pada saat yang bersamaan, kontribusi sektor industri pengolahan (termasuk pula di dalamnya agroindustri) rata-rata mencapai 26% per tahun. Dalam hal ini, pengolahan hasil pertanian menjadi produk-produk akhir memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga peningkatan nilai tambah tampak diakibatkan oleh proses pengolahan lanjutan (Tabel 2.3).

Tabel 1.3.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha di Indonesia Periode 1999-2003

Lapangan Usaha	Jumlah (Miliar Rupiah)				
	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	64.955,30	66.208,85	66.858,20	68.018,42	54.446,37
Pertambangan dan Penggalian	36.865,80	38.896,35	378.894,84	39.768,09	30.567,91
Industri Pengolahan	99.058,50	104.986,93	109.290,24	113.671,74	86.914,81
Listrik, Gas dan Air Minum	6.112,90	6.574,80	7.078,04	7.517,58	5.863,01
Bangunan	22.035,60	23.278,68	24.259,07	25.255,26	19.782,95
Perdagangan, Hotel dan Restoran	60.093,70	63.798,32	66.888,05	69.303,17	53.838,22
Pengangkutan dan Komunikasi	26.772,10	29.072,10	31.207,10	33.649,51	27.039,94
Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	26.244,60	27.449,37	28.388,62	29.963,16	23.475,65
Jasa-Jasa	37.184,00	38.051,45	38.826,87	39.596,62	30.2836,99
Total	379.352,50	398.016,85	411.691,03	426.740,55	414.127,27

Sumber: BPS (2004).

Dari subsektor tanaman pangan, ketahanan pangan nasional di masa yang akan datang diduga akan semakin terancam bila tidak ditanggapi secara cermat oleh pemerintah, mengingat selain produksi bahan pangan dalam negeri tidak selalu mampu mencukupi jumlah kebutuhan, juga terjadi akibat kegagalan musim tanam, musim panen, bencana alam, seperti longsor, banjir, gempa bumi (Gumbira-Sa'id, 2004a). Di lain pihak, pemerintah masih belum mampu menetapkan kebijakan pangan nasional secara kokoh dan strategis karena selain volume impor yang semakin tinggi terhadap beberapa jenis pangan pokok selain beras di masa lalu (misalnya jagung, kedelai, dan gula), pemerintah juga masih kurang berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani. Di lain pihak, produksi perikanan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan kinerja produksinya cukup tinggi sehingga mampu menjadikan subsektor tersebut sebagai andalan negara dari pemenuhan devisa non-migas. Meskipun demikian, pemerintah juga belum sepenuhnya berpihak pada nelayan kecil, misalnya karena intervensi birokrasi dan kapitalisasi pemerintah dalam kegiatan nelayan di beberapa wilayah yang mengakibatkan terabaikannya kepentingan-kepentingan nelayan tradisional, peraturan-peraturan penangkapan ikan yang kurang tegas dan konflik agraria akibat adanya penyerobotan wilayah perikanan tradisional oleh perusahaan perikanan modern atau pengoperasian kapal-kapal asing di sekitar Pesisir Pantai Timur Sumatera, Pantai Barat Sumatera, Perairan Pantai Utara Jawa, Perairan Kalimantan Barat, dan Kepulauan Natuna.

Di sektor peternakan, ketergantungan terhadap impor untuk produksi pakan ternak masih tinggi. Harga pakan ternak yang sempat melonjak beberapa kali lipat pada saat krisis ekonomi dan moneter yang lalu telah mengakibatkan harga pakan ternak meningkat dan membebani peternak. Selain itu, kasus merebaknya berbagai wabah penyakit, seperti sapi gila dan flu burung mengakibatkan keresahan di kalangan petani dan konsumen hasil-hasil ternak dan olahannya.

Subsektor perkebunan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja subsektor pertanian lainnya, terutama mengingat subsektor tersebut sempat menarik investasi hingga mencapai sekitar 73% dari total nilai investasi di sektor agribisnis. Akan tetapi, dengan kondisi sosial politik yang dipandang kurang kondusif untuk perkembangan bisnis, para investor asing pun banyak yang memindahkan dana investasinya ke negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang sama-sama berpotensi, tetapi memiliki kepastian dan keamanan investasi

yang lebih baik. Beberapa komoditas perkebunan primer, misalnya kelapa sawit, karet, cokelat, kopi, dan tembakau diekspor dalam keadaan segar, tetapi masih jarang dalam bentuk produk-produk turunannya. Hambatan utama yang masih menjadi kendala hingga saat ini dari subsektor tersebut adalah ketidakseragaman mutu atau standar mutu yang rendah (Gumbira-Sa'id, 2004).

Gambaran mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia di sektor agribisnis yang telah dipaparkan di atas, ditambah dengan tantangan pasar global yang telah nyata di depan mata merupakan kondisi yang perlu lebih diperhatikan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan global. Sumber daya alam yang sering dianggap melimpah, disertai dengan peningkatan produktivitasnya yang dilakukan selama ini merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif untuk merebut peluang di pasar global. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi keunggulan komparatif menjadi kompetitif tersebut hanya akan diraih apabila dalam perkembangannya hal-hal berikut ini dapat diantisipasi (Gumbira-Sa'id, 2003).

1. Teknis produksi dan penanganan pascapanen yang belum optimal, terutama dalam hal pasokan produk dan persyaratan mutu produk untuk ekspor, selain kendala konvensional, yaitu lemahnya akses ke sumber-sumber pembiayaan.
2. Manajemen transportasi dan distribusi masih lemah sehingga selain biaya distribusi yang tinggi, kesulitan mengakses informasi pasar sangat mempengaruhi lambatnya pelaku agribisnis dalam menganalisis dan mengantisipasi perubahan pasar.
3. Promosi dan advokasi produk agribisnis Indonesia kurang gencar sehingga produk-produk agribisnis Indonesia kurang dikenal di pasar global.
4. Aplikasi dan pengembangan teknologi di bidang agribisnis atau agroindustri masih lambat sehingga diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan yang lebih terfokus untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul.

Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh para pelaku agribisnis atau agroindustri pangan maupun non-pangan salah satunya adalah memperbaiki penerapan manajemen teknologi dalam lingkup aktivitas agribisnis atau agroindustri, lebih spesifik lagi pada agroindustri pangan yang

memiliki prospek yang sangat baik di kawasan Asia Pasifik. Selain mengembangkan unsur inovasi, kualitas produk pun dapat ditingkatkan sehingga akan lebih mampu memenuhi permintaan konsumen. Para pelaku agribisnis atau agroindustri tidak saja dapat menghubungkan berbagai disiplin kerekayasaan ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga akan mampu mengembangkan, membentuk dan melaksanakan tujuan-tujuan strategis dan operasional kegiatan agribisnis secara lebih baik dan terstruktur. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, para pelaku agribisnis atau agroindustri perlu menjalankan beberapa hal berikut ini.

1. Perencanaan pemanfaatan teknologi untuk tujuan agribisnis secara keseluruhan.
2. Pengorganisasian penerapan teknologi secara harmonis pada setiap sub kegiatan agribisnis, dari hulu ke hilir.
3. Penempatan posisi penerapan teknologi secara optimal sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
4. Pengawasan teknologi untuk mencapai semua tujuan kegiatan agribisnis, dengan berbasis rantai nilai pasokan.

Implementasi beberapa langkah strategis di atas diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku agribisnis atau agroindustri untuk beradaptasi dengan perkembangan agribisnis atau agroindustri di masa mendatang. Sektor agribisnis atau agroindustri diharapkan akan memiliki prospek yang lebih baik, terutama dalam menghasilkan nilai tambah melalui kegiatan agroindustri. Beberapa komoditas agroindustri untuk ekspor seharusnya mengalami peningkatan secara drastis dalam hal nilai jualnya. Sebagai contoh, pada tahun 2000 Indonesia memperoleh devisa dari perdagangan minyak goreng sawit yang mencapai sekitar 550 kali lipat dari nilai jual komoditas yang sama pada tahun 1999 (dari USD 844.255.000,00 menjadi USD 464.508.302.000,00). Selain itu, peningkatan secara drastis juga terjadi pada produk-produk pangan olahan, seperti cokelat olahan, ikan dalam kaleng, margarin, buah dalam kaleng, susu dan produk turunan susu, kembang gula, MSG, olein, gliserol dan sebagainya, dengan nilai mencapai lebih dari 500 kali lipat nilai jualnya pada tahun 1999 (Bintari, 2001). Dengan demikian, peningkatan nilai tambah tersebut merupakan salah satu bentuk peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku agribisnis karena pada masa yang akan datang, terdapat prospek yang cerah bagi sektor agribisnis atau agroindustri khususnya pangan berbasis perikanan dan

perkebunan untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitasnya sehingga diharapkan akan diperoleh nilai tambah yang lebih baik lagi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengenai pengertian ekonomi dan ekonomi pangan, serta mekanisme apakah yang dijelaskan melalui bidang tersebut!
- 2) Sebutkan pihak-pihak pengambil keputusan ekonomi!
- 3) Tahap-tahap apa sajakah yang harus dilalui dalam menganalisis ekonomi pangan?
- 4) Jelaskan mengenai tingkat kepentingan dilakukannya lokalisasi produksi pangan dalam menghadapi isu pangan global!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab soal-soal latihan di atas, Anda harus mempelajari kembali Kegiatan Belajar 2.



RANGKUMAN

1. Pendekatan ekonomi pangan merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis ketahanan pangan, yang fokusnya diarahkan pada proses identifikasi dan kuantifikasi akses terhadap ketersediaan pangan.
2. Fokus perbaikan ketersediaan produk pangan ditujukan pada proses pengembangan ke arah diversifikasi, pengembangan jenis pangan baru, produksi pangan, ekspor dan impor pangan, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif dan bernilai tambah tinggi.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pihak-pihak pengambil keputusan adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. rumah tangga
 - B. individu
 - C. perusahaan
 - D. pemerintah

- 2) Berikut ini merupakan contoh yang termasuk perusahaan ditinjau dari ilmu ekonomi, *kecuali*
 - A. petani
 - B. modal
 - C. Bank
 - D. pengolah bahan baku menjadi barang jadi

- 3) Fungsi pemerintah sebagai komponen yang membentuk ekonomi adalah
 - A. penyedia tenaga kerja, lahan, dan modal
 - B. penyedia produk dan jasa
 - C. penjamin pendistribusian produk dan jasa kepada konsumen
 - D. pembayar pajak sebagai konsekuensi dari layanan yang diterima

- 4) Fungsi agribisnis pangan dalam kaitannya dengan ekonomi pangan adalah sebagai berikut ini, *kecuali*
 - A. produksi pangan, pakan dan serat
 - B. perlindungan kondisi lingkungan dan lansekap lahan
 - C. mempertahankan viabilitas lingkungan pedesaan dan menyeimbangkan pembangunan teritorial
 - D. pemeratakan hasil dari pengelolaan sumber daya

- 5) Dalam analisis ekonomi pangan menurut Boudreau, penentuan strategi dilakukan pada tahap
 - A. pengembangan pemenuhan pangan
 - B. identifikasi tujuan
 - C. analisis skenario
 - D. spesifikasi masalah

- 6) Asumsi-asumsi berikut ini digunakan dalam memahami ekonomi pangan, *kecuali*
- A. masing-masing individu memiliki preferensi yang homogen
 - B. individu dikaruniai keterbatasan sumber daya dan teknologi
 - C. tindakan ekonomis individu didasarkan pada informasi yang tersedia
 - D. pilihan individu ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar maupun mekanisme perintah atau komando
- 7) Dalam proses pengembangan teori ekonomi, apabila prediksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya maka tindakan yang dilakukan adalah
- A. menentukan prediksi baru
 - B. memodifikasi asumsi
 - C. menetapkan asumsi
 - D. menguji prediksi
- 8) Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi sub sektor perikanan sebagai sumber andalan untuk pemenuhan devisa nonmigas, *kecuali*
- A. peningkatan kinerja produksi perikanan yang cukup tinggi
 - B. pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada nelayan kecil
 - C. intervensi pemerintah yang mengabaikan kepentingan nelayan tradisional
 - D. penyerobotan wilayah perikanan tradisional oleh perusahaan perikanan modern
- 9) Hal-hal yang harus diantisipasi untuk mewujudkan transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif adalah sebagai berikut, *kecuali*
- A. manajemen transportasi dan distribusi yang masih lemah
 - B. promosi dan advokasi produk agribisnis yang kurang gencar
 - C. aplikasi dan pengembangan teknologi di bidang agrobisnis yang pesat
 - D. teknis produksi dan penanganan pascapanen yang belum optimal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D
- 2) B
- 3) D
- 4) C
- 5) B
- 6) A
- 7) C
- 8) C

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) C
- 3) C
- 4) D
- 5) C
- 6) A
- 7) B
- 8) A
- 9) C

Daftar Pustaka

- Bintari, N.R. (2001). Garut, *Surga Bumi Priangan*. Komoditas No. 33, 28 Maret – 10 April 2001.
- Bodreau, T. (1998). *The Food Economy Approach: A Framework for Understanding Rural Livelihoods*. Paper. London. UK: Relief and Rehabilitation Network.
- BPS. (2004). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- CIC (Capricorn Indonesia Consult Inc.). (2004). *CIC Business Report: Indocommercial No.351*. 25th November 2004. CIC. Jakarta.
- Davey, B. (1999). *Food Economics*. Ecoworks. <http://www.sharelynx.com/web/BDavey/Bread.htm>.
- Depoele, L. (2000). *The European Model of Agriculture – Rhetoric of Reality? Implications of Rural Areas*. E. Pitt (Ed.). Prosiding. Agri-Economics Conference. Dublin: Agri-Food Economics Conference.
- Edward, D. (2004). *Ada Lima Sektor Primadona Bagi Pelemparan Kredit Perbankan*. Artikel. Bisnis Indonesia. Kolom Perbankan. Senin, 20 Desember 2004. Di dalam <http://www.bisnis.com> (Diakses tanggal 22 Desember 2004).
- Forsman, S. (2004). *Value Creation in Local Food Supply Chains: Market Opportunities and Challenges*. 14th Annual World Food and Agribusiness Forum, Symposium and Case Conference. 12-15 Juni 2004. Montreux, Switzerland: IAMA.
- Gumbira-Sa'id, E. (2002). *Mengembangkan Pelaku dan Manajemen Agribisnis atau Agroindustri Nasional*. Makalah. Sosialisasi dan Pelatihan P-KSP, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Bapeda Kabupaten Pasir. 12 Agustus 2002. Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.

- Gumbira-Sa'id, E. (2004a). *Kebijakan Ekonomi Politik Pertanian dan Strategi Pengembangan Agribisnis atau Agroindustri*. Makalah. Seminar Politik Ekonomi Pertanian dan Pemilu 2004. Jakarta: Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor. 28 Februari 2004.
- Gumbira-Sa'id, E. (2005). *Pengolahan dan Penanganan Hasil Pertanian Berwawasan Lingkungan dalam Peningkatan Nilai Tambah*. Makalah. *Workshop Pembekalan Kompetensi Agribisnis dan Agroindustri Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi di DKI Jakarta*. 6-7 April 2005. Jakarta: Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta dan Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta.
- Gumbira-Sa'id, E. dan A.H. Intan. (2001). *Manajemen Agribisnis*. Indonesia: Ghalia
- Gumbira-Sa'id, E. dan G.C. Dewi. (2004). *Kinerja Agribisnis Indonesia Pasca Krisis*. Agrimedia Vol. 8 No. 2. MMA-IPB. Bogor.
- Harling, K. (2003). *What Agribusinesses Are. The Mapple Leaf Conference*. The 5th International Conference for Case Studies Dealing with Managing Companies in the Food and Fiber System. School of Business and Economics. 20 Juni 2003. Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University.
- Hodge, H.N. dan S. Gorelick. *Bringing the Food Economy Home*. <http://www.isec.org.uk/articles/bringing.html>.
- Maxwell, S. (2003). *Food Policy Old and New*. Paper. Briefing Paper. LEAD International Session. Overseas Development Institute.
- Samuel, S.N., B. Anderson dan G. Riggs. (1996). *Research Funding for Australian Agribusiness: Some Empirical Evidence*. Journal. Australian Agribusiness Review - Vol. 4 - No. 2 - 1996. Australia: Department of Agriculture, University of Melbourne dan Department of Marketing Management, University of New England.

World Bank. (2005). *Global Economic Prospects: Trade, Regionalism and Development*. Swiss: World Bank.

WTO (World Trade Organization). (2004). *International Trade Statistics 2004*. New York.